

Penyelenggara:



ISIF 2023

INDONESIA SOCIAL INVESTMENT FORUM

AKSELERASI PENCAPAIAN SDGs PASCA-COVID-19

Partner:



NUTRICIA



CLOSING SPEECH

Yanuar Nugroho, Ph.D.

Sekretariat Nasional SDGs Bappenas RI

The Westin Resort Nusa Dua, Bali

13 Desember 2023



PENGUATAN PENCAPAIAN SDGs DI INDONESIA

YANUAR NUGROHO
Koordinator Tenaga Ahli, Sekretariat Nasional SDGs
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Baca artikel lainnya seperti ini melalui aplikasi Kompas.id dengan mendaftar QR Code

► kita.kompas.id/interaktif



Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Senin (18/9/2023).

Target Meleset, SDGs Bisa Molor 42 Tahun

Jelang Sidang Majelis Umum PBB, dunia diingatkan, 90 persen target SDGs tak akan tercapai pada 2030. Diperlukan 42 tahun lagi untuk mencapainya.

NEW YORK, KOMPAS — Sidang Majelis Umum PBB dimulai, Selasa (19/9/2023), di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Sidang dibuka Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, lalu dilanjutkan dengan pidato para pemimpin, diawali Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden AS Joe Biden, dan seterusnya.

"Untuk kita sedang tak stabil. Ketegangan geopolitik meningkat. Tantangan global meningkat. Dan, kita tampak tidak mampu bersama memberikan respons," kata Guterres.

Menanggapi PBB—dan cara negara-negara bekerja sama—harus berubah untuk menjawab tantangan dunia. "Dunia sudah berubah. Lembaga-lembaga kita belum. Kita tidak bisa efektif mengatasi masalah jika lembaga-lembaga kita tak mencerminkan dunia saat ini," ujar Guterres.

Sehari sebelumnya, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), ia memaparkan agenda Pembangunan Berkelanjutan yang terlewatkan. Ia salah satu penyebabnya, negara-negara kaya harus berkolaborasi dan melakukan aksi nyata yang lebih adil.

Tidak hanya mengambing-jambing pemenuhan, sebaliknya, negara-negara kaya bahkan mengabaikan komitmen mereka berkolaborasi untuk mendukung negara-negara berkembang yang sedang berjuang menghadapi krisis iklim, serta ketahanan pangan, energi, air, dan polusi, serta meningkatkan kebutuhan pembiayaan. Revisi Peta Jalan SDGs Indonesia menunjukkan peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk mencapai SDGs pada 2030, dari 1 triliun dolar AS menjadi 1,7 triliun dolar AS.

Pencapaian target SDGs membutuhkan kerja sama yang berkelanjutan dari semua pihak, baik pemerintah maupun para pemangku kepentingan. Kerja sama tersebut juga harus didukung berbagai instrumen pendanaan inovatif yang melibatkan sektor swasta, filantropi, dan investor demi tercapainya transformasi pembangunan. PBB mengimbau semua negara anggota untuk menggerakkan sebanyak mungkin sumber daya untuk mencapai SDGs pada 2030, dari 1 triliun dolar AS menjadi 1,7 triliun dolar AS.

Sebelum Sidang Majelis Umum PBB, dunia diingatkan, 90 persen target SDGs tak akan tercapai pada 2030. Diperlukan 42 tahun lagi untuk mencapainya.

Sebelum Sidang Majelis Umum PBB, dunia diingatkan, 90 persen target SDGs tak akan tercapai pada 2030. Diperlukan 42 tahun lagi untuk mencapainya.

Sebelum Sidang Majelis Umum PBB, dunia diingatkan, 90 persen target SDGs tak akan tercapai pada 2030. Diperlukan 42 tahun lagi untuk mencapainya.

Sebelum Sidang Majelis Umum PBB, dunia diingatkan, 90 persen target SDGs tak akan tercapai pada 2030. Diperlukan 42 tahun lagi untuk mencapainya.

Sebelum Sidang Majelis Umum PBB, dunia diingatkan, 90 persen target SDGs tak akan tercapai pada 2030. Diperlukan 42 tahun lagi untuk mencapainya.

FX LAKSANA AS

LAPORAN DARI AMERIKA SERIKAT

Guterres melapor, tapi dengan saat ini, hanya 50 persen dari target SDGs yang sesuai jalur, 50 persen lambat, dan 30 persen stagnan atau mundur. Tingkat kelaparan global tertinggi sejak 2005, dan perlu 286 tahun untuk mengatasi kesenjangan jender. Seperti negara berkembang mengalami krisis utang dan negara maju tak berhasil merealisasikan janji bantuan kepada negara berkembang.

TPB menargetkan kemiskinan ekstrem hapus pada 2030. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai orang dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar AS per hari berdasarkan paritas daya beli tahun 2017. TPB memiliki 17 tujuan. Setiap negara menetapkan sendiri targetnya. Dalam laporan TPB global, capaian negara berkembang dan miskin paling jauh dari target. Dibutuhkan 42 tahun mencapai target TPB 2030.

Ketimpangan yang lebar tak menguntungkan bagi dunia, bahkan bagi negara kaya. Eropa kini kewalahan diserbu imigran, sebagian ilegal, dari Afrika dan Asia. AS juga menghadapi banjir imigran gelap dari Amerika Tengah dan Selatan. Di tengah dunia yang menggolok, saling terkait dan tergantung satu sama lain, tidak dapat lagi satu negara atau suatu kawasan maju dan makmur sendirian. Kerentanan sosial yang muncul karena kemiskinan atau ketidakadilan di suatu wilayah bisa mengguncang dunia, seperti guncangan karena revolusi Arab Spring di Tunisia dan Mesir pada 2011.

Dunia menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim menyulitkan banyak negara, menimbulkan bencana banjir dan kekeringan sekaligus serta penyakit. Pandemi seperti Covid-19 dapat terjadi lagi di masa depan. Perang seperti di Ukraina bisa meluas di bagian lain dunia, termasuk di Asia Timur.

Peta jalan mencapai keadilan dunia adalah melalui TPB. Karena itu, target TPB harus diperjuangkan semua negara. PBB harus berubah menjadi wadah yang lebih adil bagi semua bangsa. Tanpa kesediaan bekerja sama, dan negara kaya membantu negara berkembang dan miskin menjadi maju, tak akan ada perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial bagi semua.

Dalam pertemuan dengan wartawan Indonesia sesuai undangan acara pada Senin ini, Retno mengungkapkan dan menjelaskan sejumlah hal. Merujuk laporan SDGs yang dirilis PBB, Retno mengatakan, hanya 12 persen target SDGs sesuai global yang sesuai jalur. Sebanyak 50 persen target kemajuan lambat dan 30 persen stagnan atau mundur.

Laporan PBB juga menyebutkan, tingkat kelaparan global saat ini adalah yang tertinggi sejak 2005. Tingkat kesenjangan jender diperlebar 286 tahun untuk mengatasinya.

Laporan yang sama menyebutkan, negara berkembang meredakan dampak yang paling parah, seperti akibat perubahan iklim. Sementara kondisi bantuan dari negara maju kepada negara berkembang tidak memadai.

Ia menyebut pada konferensi bertema "Kerangka Kerja untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan, Energi, Air, dan Polusi, serta Meningkatkan Kebutuhan Pembiayaan untuk Mencapai SDGs pada 2030, dari 1 triliun dolar AS menjadi 1,7 triliun dolar AS."

Dalam pernyataan bersama atas nama ASEAN, Retno mengatakan, komitmen kuat ASEAN untuk mencapai target SDGs. "Komitmen dan upaya ASEAN untuk mencapai SDGs ditunjukkan dengan Visi ASEAN 2035. Visi ASEAN

2045," ujarnya.

Khususnya di tengah situasi global yang tidak menentu seperti sekarang ini, ASEAN akan terus berupaya memperkuat kapabilitasnya agar tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan dan guncangan di masa yang akan datang.

Dalam pertemuan dengan wartawan Indonesia sesuai undangan acara pada Senin ini, Retno mengungkapkan dan menjelaskan sejumlah hal. Merujuk laporan SDGs yang dirilis PBB, Retno mengatakan, hanya 12 persen target SDGs sesuai global yang sesuai jalur. Sebanyak 50 persen target kemajuan lambat dan 30 persen stagnan atau mundur.

Laporan PBB juga menyebutkan, tingkat kelaparan global saat ini adalah yang tertinggi sejak 2005. Tingkat kesenjangan jender diperlebar 286 tahun untuk mengatasinya.

Laporan yang sama menyebutkan, negara berkembang meredakan dampak yang paling parah, seperti akibat perubahan iklim. Sementara kondisi bantuan dari negara maju kepada negara berkembang tidak memadai.

Ia menyebut pada konferensi bertema "Kerangka Kerja untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan, Energi, Air, dan Polusi, serta Meningkatkan Kebutuhan Pembiayaan untuk Mencapai SDGs pada 2030, dari 1 triliun dolar AS menjadi 1,7 triliun dolar AS."

Dalam pernyataan bersama atas nama ASEAN, Retno mengatakan, komitmen kuat ASEAN untuk mencapai target SDGs. "Komitmen dan upaya ASEAN untuk mencapai SDGs ditunjukkan dengan Visi ASEAN 2035. Visi ASEAN

2045," ujarnya.

Khususnya di tengah situasi global yang tidak menentu seperti sekarang ini, ASEAN akan terus berupaya memperkuat kapabilitasnya agar tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan dan guncangan di masa yang akan datang.

Dalam pertemuan dengan wartawan Indonesia sesuai undangan acara pada Senin ini, Retno mengungkapkan dan menjelaskan sejumlah hal. Merujuk laporan SDGs yang dirilis PBB, Retno mengatakan, hanya 12 persen target SDGs sesuai global yang sesuai jalur. Sebanyak 50 persen target kemajuan lambat dan 30 persen stagnan atau mundur.

Laporan PBB juga menyebutkan, tingkat kelaparan global saat ini adalah yang tertinggi sejak 2005. Tingkat kesenjangan jender diperlebar 286 tahun untuk mengatasinya.

Target TPB Harus Tercapai

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan terbelengkalnya agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan ketimpangan melebar.

Berbicara sehari sebelum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 19-26 September di New York, Amerika Serikat, Guterres menyebut hanya 15 persen target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) sesuai jalur. Sisanya mandek, bahkan mundur (Kompas, 20/9/2023). Penyebab utamanya adalah negara-negara maju lebih banyak berototika. Negara-negara kaya terus melestarikan sistem lama yang tak adil.

Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), yang diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menyebutkan, negara-negara Selatan, umumnya negara berkembang, tidak mendapatkan kesempatan setara dalam bertumbuh dan melompat menjadi negara kaya. Masih ada diskriminasi dalam perdagangan dan hambatan untuk hilirisasi industri berbasis baku alam.

Secara global, PBB melapor capaian TPB hanya 12 persen yang sesuai jalur, 50 persen lambat, dan 30 persen stagnan atau mundur. Tingkat kelaparan global tertinggi sejak 2005, dan perlu 286 tahun untuk mengatasi kesenjangan jender. Seperti negara berkembang mengalami krisis utang dan negara maju tak berhasil merealisasikan janji bantuan kepada negara berkembang.

TPB menargetkan kemiskinan ekstrem hapus pada 2030. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai orang dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar AS per hari berdasarkan paritas daya beli tahun 2017. TPB memiliki 17 tujuan. Setiap negara menetapkan sendiri targetnya. Dalam laporan TPB global, capaian negara berkembang dan miskin paling jauh dari target. Dibutuhkan 42 tahun mencapai target TPB 2030.

Ketimpangan yang lebar tak menguntungkan bagi dunia, bahkan bagi negara kaya. Eropa kini kewalahan diserbu imigran, sebagian ilegal, dari Afrika dan Asia. AS juga menghadapi banjir imigran gelap dari Amerika Tengah dan Selatan.

Di tengah dunia yang menggolok, saling terkait dan tergantung satu sama lain, tidak dapat lagi satu negara atau suatu kawasan maju dan makmur sendirian. Kerentanan sosial yang muncul karena kemiskinan atau ketidakadilan di suatu wilayah bisa mengguncang dunia, seperti guncangan karena revolusi Arab Spring di Tunisia dan Mesir pada 2011.

Dunia menghadapi tantangan besar. Perubahan iklim menyulitkan banyak negara, menimbulkan bencana banjir dan kekeringan sekaligus serta penyakit. Pandemi seperti Covid-19 dapat terjadi lagi di masa depan. Perang seperti di Ukraina bisa meluas di bagian lain dunia, termasuk di Asia Timur.

Peta jalan mencapai keadilan dunia adalah melalui TPB. Karena itu, target TPB harus diperjuangkan semua negara. PBB harus berubah menjadi wadah yang lebih adil bagi semua bangsa. Tanpa kesediaan bekerja sama, dan negara kaya membantu negara berkembang dan miskin menjadi maju, tak akan ada perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial bagi semua.

Dalam pertemuan dengan wartawan Indonesia sesuai undangan acara pada Senin ini, Retno mengungkapkan dan menjelaskan sejumlah hal. Merujuk laporan SDGs yang dirilis PBB, Retno mengatakan, hanya 12 persen target SDGs sesuai global yang sesuai jalur. Sebanyak 50 persen target kemajuan lambat dan 30 persen stagnan atau mundur.

Laporan PBB juga menyebutkan, tingkat kelaparan global saat ini adalah yang tertinggi sejak 2005. Tingkat kesenjangan jender diperlebar 286 tahun untuk mengatasinya.

Laporan yang sama menyebutkan, negara berkembang meredakan dampak yang paling parah, seperti akibat perubahan iklim. Sementara kondisi bantuan dari negara maju kepada negara berkembang tidak memadai.

Ia menyebut pada konferensi bertema "Kerangka Kerja untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan, Energi, Air, dan Polusi, serta Meningkatkan Kebutuhan Pembiayaan untuk Mencapai SDGs pada 2030, dari 1 triliun dolar AS menjadi 1,7 triliun dolar AS."

Dalam pernyataan bersama atas nama ASEAN, Retno mengatakan, komitmen kuat ASEAN untuk mencapai target SDGs. "Komitmen dan upaya ASEAN untuk mencapai SDGs ditunjukkan dengan Visi ASEAN 2035. Visi ASEAN

2045," ujarnya.

Khususnya di tengah situasi global yang tidak menentu seperti sekarang ini, ASEAN akan terus berupaya memperkuat kapabilitasnya agar tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan dan guncangan di masa yang akan datang.

Rapor Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

Suharso Monoarfa
Menteri PPN/Kepati Bappenas



Dunia terenyak. Pada SDGs Summit dalam rangkaian Sidang Umum PBB 2023 di New York, Amerika Serikat, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan, hanya 15 persen target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan jalur (Kompas, 20/9/2023).

Sebelumnya, pada Maret 2023, dalam Forum Asia-Pasifik tentang Pembangunan Berkelanjutan (APFSD) di Bangkok, Thailand, Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) juga menyatakan bahwa wilayah Asia-Pasifik tertinggal 35 tahun dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Artinya, target SDGs yang ditargetkan dicapai pada 2030 bisa jadi hanya mampu dicapai 42 tahun lagi, yakni pada tahun 2065.

Bagaimana dengan Indonesia?

Di tingkat global, *Sustainable Development Report 2023* menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-75 dunia, naik signifikan dibandingkan dengan empat tahun lalu di peringkat ke-102. Skor indeks SDGs Indonesia meningkat dari 64,2 pada tahun 2019 menjadi 70,2 pada 2023 (SDSN).

Di tingkat nasional, Kementerian PPN/Bappenas melaporkan capaian SDGs Nasional pada 2023 menunjukkan 76 persen indikator SDGs di Indonesia telah tercapai dan mengalami kemajuan, terdiri atas 60 persen target tercapai dan 16 persen akan tercapai.

Meskipun tertunda oleh pandemi Covid-19, kinerja capaian SDGs Indonesia jauh lebih baik daripada rata-rata dunia. Tentu saja, kita tak boleh terlena dengan capaian yang membanggakan dan membesarkan hati ini karena masih banyak pekerjaan rumah untuk menggerakkan capaian SDGs demi membangun negeri tercinta.

Komitmen Indonesia

Di tingkat global, pelaksanaan SDGs bersifat sukarela. Tidak ada paksaan dan tidak ada sanksi atau embargo jika satu negara anggota PBB tidak melaksanakan SDGs. Namun, Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan SDGs di negeri ini adalah wajib karena SDGs sejalan de-

ngan mandat konstitusi untuk membangun dan menyejahterakan bangsa.

Indonesia telah mendeklarasikan komitmen untuk melaksanakan dan mencapai SDGs sejak September 2015.

Sebagai koordinator SDGs, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan dan menyalurkan SDGs dengan Nawacita Presiden RI Joko Widodo sebagai visi pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024, dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahunan, termasuk dokumen anggaran yang menyertai.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang diperbarui dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memandatkan penyusunan dan penetapan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional.

Selain itu, perpres ini juga mengoordinasikan fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs lima tahunan, mengarahkan adanya koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian SDGs di tingkat nasional dan daerah, serta mengoordinasikan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan komitmen dan seluruh kerja keras yang sudah dilakukan, seperti apa capaian Indonesia dalam SDGs sejak tahun 2016?

Capaian empat pilar

Implementasi SDGs yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 289 indikator dikoordinasikan dalam empat pilar, yakni Pembangunan Sosial, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Lingkungan, dan Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Sejumlah indikator Pilar Pembangunan Sosial, mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5, telah tercapai atau mengalami kemajuan. Misalnya, menurunnya penduduk di bawah garis kemiskinan nasional, dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,36 persen pada Maret 2023.

Selain itu, meningkatnya nilai tambah pertanian, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, tingkat pembelajaran ter-

nyata. Selain itu, perpres ini juga mengoordinasikan fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs lima tahunan, mengarahkan adanya koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian SDGs di tingkat nasional dan daerah, serta mengoordinasikan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan komitmen dan seluruh kerja keras yang sudah dilakukan, seperti apa capaian Indonesia dalam SDGs sejak tahun 2016?

Sejumlah indikator Pilar Pembangunan Sosial, mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5, telah tercapai atau mengalami kemajuan. Misalnya, menurunnya penduduk di bawah garis kemiskinan nasional, dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,36 persen pada Maret 2023.

Selain itu, meningkatnya nilai tambah pertanian, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, tingkat pembelajaran ter-

nyata. Selain itu, perpres ini juga mengoordinasikan fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs lima tahunan, mengarahkan adanya koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian SDGs di tingkat nasional dan daerah, serta mengoordinasikan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan komitmen dan seluruh kerja keras yang sudah dilakukan, seperti apa capaian Indonesia dalam SDGs sejak tahun 2016?

Sejumlah indikator Pilar Pembangunan Sosial, mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5, telah tercapai atau mengalami kemajuan. Misalnya, menurunnya penduduk di bawah garis kemiskinan nasional, dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,36 persen pada Maret 2023.

Selain itu, meningkatnya nilai tambah pertanian, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, tingkat pembelajaran ter-

nyata. Selain itu, perpres ini juga mengoordinasikan fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs lima tahunan, mengarahkan adanya koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian SDGs di tingkat nasional dan daerah, serta mengoordinasikan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan komitmen dan seluruh kerja keras yang sudah dilakukan, seperti apa capaian Indonesia dalam SDGs sejak tahun 2016?

Sejumlah indikator Pilar Pembangunan Sosial, mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5, telah tercapai atau mengalami kemajuan. Misalnya, menurunnya penduduk di bawah garis kemiskinan nasional, dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,36 persen pada Maret 2023.

Selain itu, meningkatnya nilai tambah pertanian, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, tingkat pembelajaran ter-

nyata. Selain itu, perpres ini juga mengoordinasikan fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs lima tahunan, mengarahkan adanya koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian SDGs di tingkat nasional dan daerah, serta mengoordinasikan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan komitmen dan seluruh kerja keras yang sudah dilakukan, seperti apa capaian Indonesia dalam SDGs sejak tahun 2016?

nyata. Selain itu, perpres ini juga mengoordinasikan fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs lima tahunan, mengarahkan adanya koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian SDGs di tingkat nasional dan daerah, serta mengoordinasikan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan komitmen dan seluruh kerja keras yang sudah dilakukan, seperti apa capaian Indonesia dalam SDGs sejak tahun 2016?

Sejumlah indikator Pilar Pembangunan Sosial, mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5, telah tercapai atau mengalami kemajuan. Misalnya, menurunnya penduduk di bawah garis kemiskinan nasional, dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,36 persen pada Maret 2023.

Selain itu, meningkatnya nilai tambah pertanian, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, tingkat pembelajaran ter-

nyata. Selain itu, perpres ini juga mengoordinasikan fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs lima tahunan, mengarahkan adanya koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian SDGs di tingkat nasional dan daerah, serta mengoordinasikan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan komitmen dan seluruh kerja keras yang sudah dilakukan, seperti apa capaian Indonesia dalam SDGs sejak tahun 2016?

Sejumlah indikator Pilar Pembangunan Sosial, mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5, telah tercapai atau mengalami kemajuan. Misalnya, menurunnya penduduk di bawah garis kemiskinan nasional, dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,36 persen pada Maret 2023.

Selain itu, meningkatnya nilai tambah pertanian, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, tingkat pembelajaran ter-

nyata. Selain itu, perpres ini juga mengoordinasikan fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs lima tahunan, mengarahkan adanya koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian SDGs di tingkat nasional dan daerah, serta mengoordinasikan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan komitmen dan seluruh kerja keras yang sudah dilakukan, seperti apa capaian Indonesia dalam SDGs sejak tahun 2016?

- Indonesia termasuk dari 193 negara yg berkomitmen terhadap pencapaian SDGs
- 124 dari 169 target SDGs telah diarusutamakan dalam RPJMN 2020-2024

2030

- Ekonomi diproyeksikan terbesar ke 5 dunia, dg PDB/kapita sebesar USD23,199
- Penduduk besar, dengan 319 juta jiwa dan 70% kelas menengah

2045

2020

- Ekonomi ke 16 dunia
- PDB/kapita \$4,244
- Penduduk 269 juta jiwa
- 20% populasi merupakan kelas menengah

Rata-rata pertumbuhan
2015-2045:

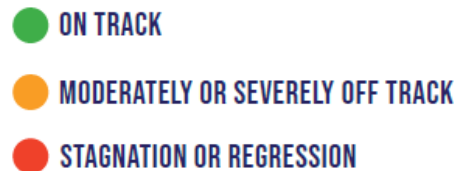
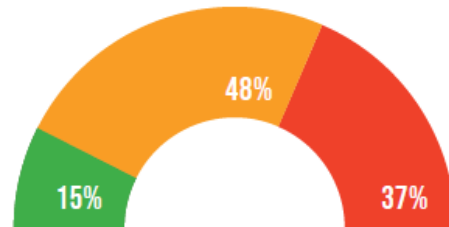
PDB Riil	PDB Riil / Kapita
5,7%	5,0%

Produktivitas tenaga kerja ditingkatkan dan kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi



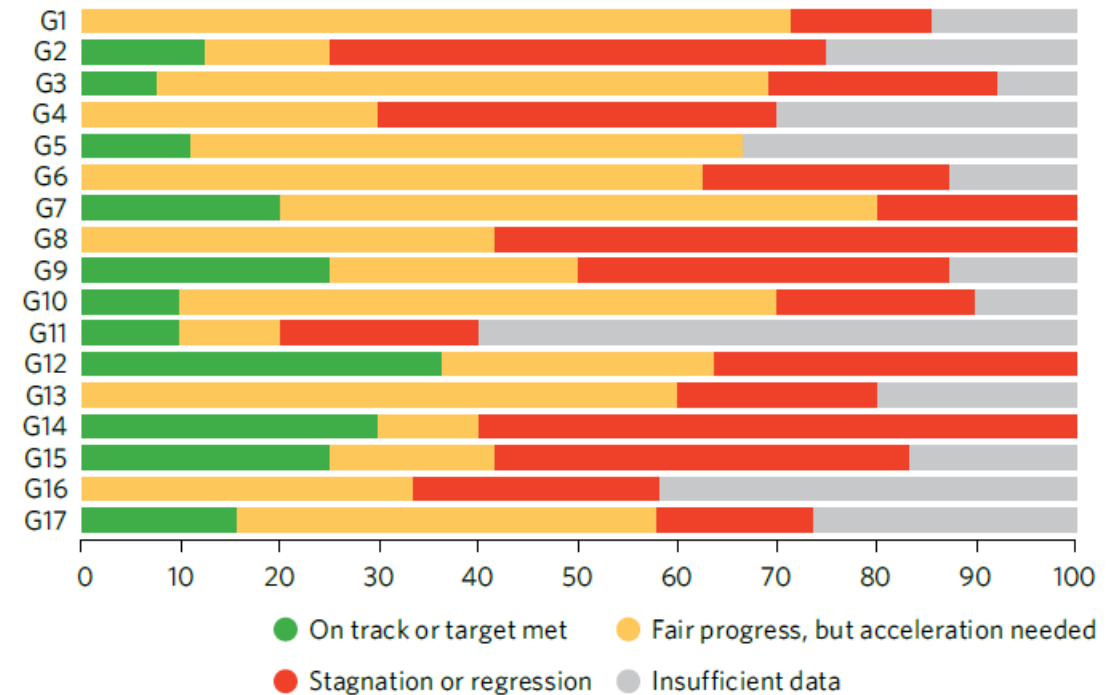
Prasyarat: SDM yang berkualitas, produktif, dan menguasai teknologi

A **CONCERNING PICTURE** OF SDG PROGRESS AT THE MIDPOINT:



BASED ON AN ASSESSMENT OF SDG TARGETS WITH TREND DATA.

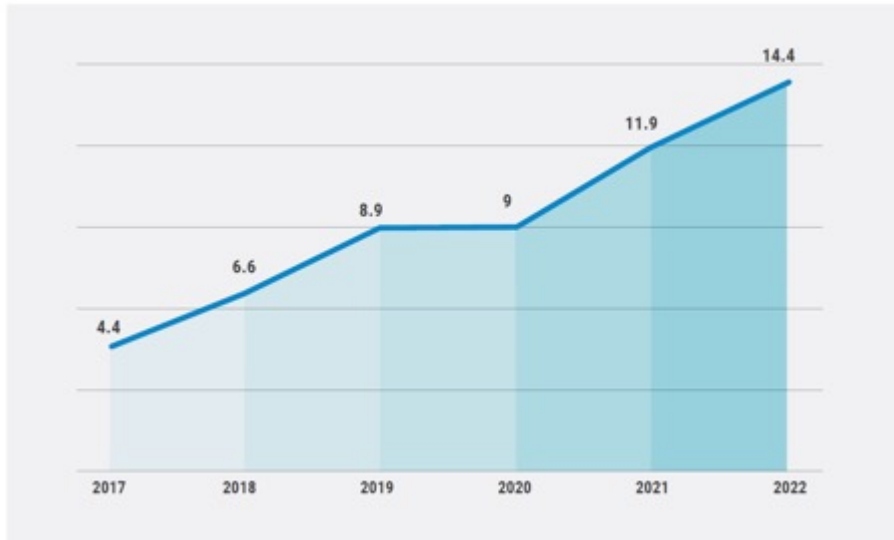
Progress assessment for the 17 Goals based on assessed targets, 2023 or latest data (percentage)



Sumber: The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition, United Nations

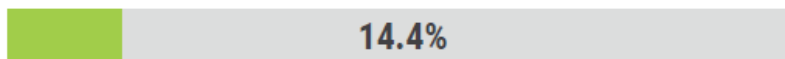
- Berdasarkan evaluasi kemajuan pencapaian SDGs pada titik tengah perjalanan menuju 2030 menunjukkan tantangan yang sangat signifikan (UN, 2023). Dari 140 target yang dapat dievaluasi (tren data tersedia):
 - Hanya **15%** target yang tercapai (**on track**);
 - Hampir setengah target SDGs terkategori *off track* sedang dan parah dari target yang diinginkan; dan
 - Lebih dari 30% target mengalami stagnansi dan kemunduran di bawah *baseline* 2015.
- Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk **upaya intensif dari seluruh negara untuk memastikan target SDGs kembali on track dan mengalami kemajuan** untuk mencapai pembangunan Berkelanjutan di tahun 2030.

Progres menuju target SDGs 2030 di regional Asia Pasifik (%), 2017-2022



Sustainable Development Goals

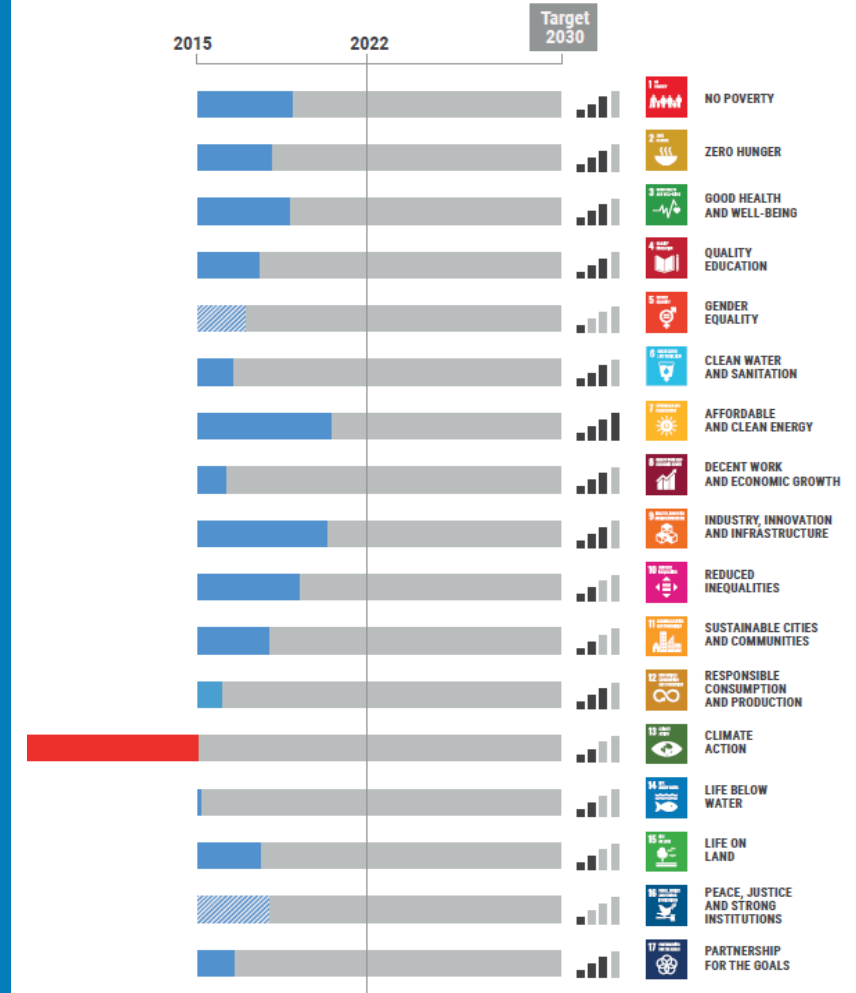
2022 Progress



Estimated time remaining: 42 years

- Pada pertengahan menuju 2030, regional Asia Pasifik seharusnya sudah mencapai 50% progres menuju target. Tetapi, saat ini progresnya baru sekitar **14%**.
- Butuh waktu **42 tahun lagi (2065)** bagi regional Asia Pasifik mencapai target SDGs.
- Untuk itu, diperlukan akselerasi dan upaya/ intervensi yang berlipat ganda untuk bisa mengejar ketertinggalan ini.
- *Highlight* progress capaian:
 - Progres paling signifikan: *Goal 7* dan *Goal 9*
 - Progres lambat: *Goal 6*, *Goal 8*, *Goal 12*, *Goal 14*, dan *Goal 17*.
 - Progres yang memburuk: *Goal 13*

Snapshot progress setiap goal di regional Asia Pasifik, 2022



PROGRES PENCAPAIAN SDGs INDONESIA

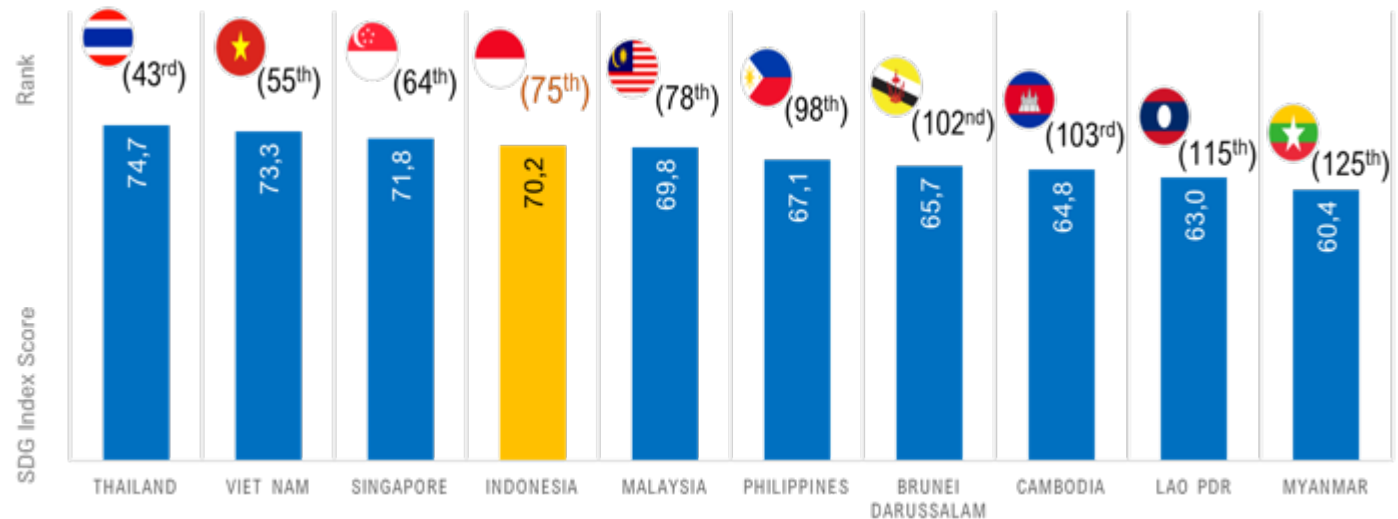
(Sustainable Development Report, SDSN)



Peringkat dan Skor Indeks SDGs: INDONESIA

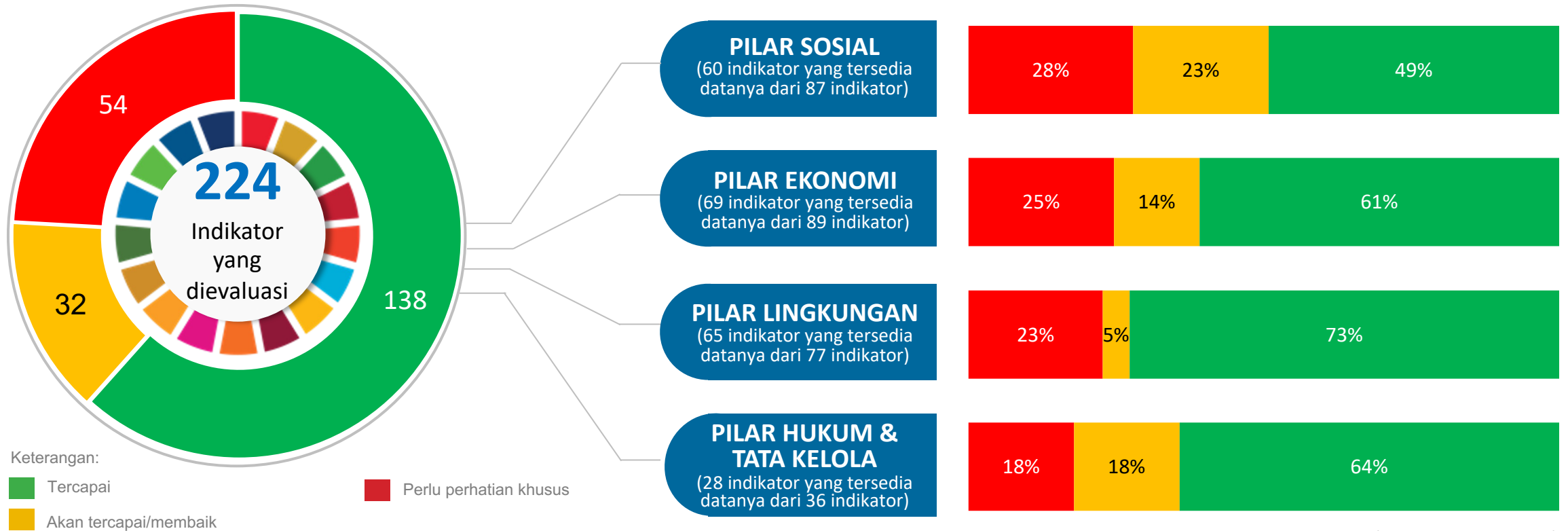
Tahun	Peringkat	Skor
2023	↑ 75/166	70,2
2022	↑ 82/163	69,2
2021	↑ 97/165	66,3
2020	↑ 101/166	65,3
2019	102/162	64,2

Perbandingan Indeks SDGs Negara-negara ASEAN, 2023



Sumber: Sustainable Development Report 2023, SDSN

- Di tengah tantangan global dan regional dalam pencapaian SDGs, Indonesia telah menunjukkan progres yang cukup baik. Berdasarkan *Sustainable Development Report 2023 (SDSN)*, Indonesia saat ini berada di **peringkat ke-75**, naik signifikan dibandingkan posisi Indonesia empat tahun lalu (peringkat 102).
- Memerlukan upaya **percepatan** untuk menuju pencapaian sesuai target yang diharapkan.




Sumber: Laporan Pelaksanaan Pencapaian SDGs 2023 (status 18 Oktober 2023)
 Ket: terdapat 1 indikator di pilar sosial yang capaiannya tidak dapat diberikan notifikasi (5.a.2*) karena data baru tersedia 1 tahun dan targetnya PM



- Berdasarkan RAN SDGs sebagai *benchmark* monitoring capaian SDGs tahun 2022, 62% dari 224 indikator yang dievaluasi telah mencapai target. **Sedangkan sisanya menunjukkan kemajuan (akan tercapai) dan memerlukan perhatian khusus.**

SOSIAL

- 

Penghapusan kemiskinan, pemberian perlindungan sosial, akses layanan dasar
- 

Ketahanan pangan (pertanian & peternakan) dan perbaikan gizi
- 

Kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, keluarga berencana, pemenuhan tenaga kesehatan
- 

Akses dan kualitas pendidikan, keterampilan, fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik
- 

Kesempatan kerja, kekerasan, perkawinan anak

EKONOMI

- 

Penyediaan dan akses listrik, gas, energi terbarukan
- 

Pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengangguran, pariwisata, UMKM
- 

Penguatan infrastruktur, transportasi, industri, riset ilmiah, inovasi
- 

Pembangunan daerah, desa, pemberian jaminan ketenagakerjaan
- 

Akses teknologi dan internet, kerjasama pembangunan, penyediaan data

LINGKUNGAN

- 

Penyediaan dan kualitas air minum, sanitasi, air, sumber daya air
- 

Akses rumah/hunian tempat tinggal layak, akses transportasi, warisan budaya, kualitas udara, ruang terbuka publik
- 


Pengelolaan *food loss and waste*, sampah, limbah B3, produk ramah lingkungan
- 

Mitigasi Bencana alam, perubahan iklim, emisi GRK, pendidikan lingkungan
- 

Pencegahan pencemaran laut, *illegal fishing*, upaya konservasi perairan
- 

Perlindungan keanekaragaman hayati, Kawasan konservasi, spesies terancam punah

HUKUM & TATA KELOLA

- 

Penghapusan kekerasan, kejahatan, konflik, eksploitasi, perdagangan manusia, korupsi, penguatan kelembagaan, perlindungan hak asasi manusia



KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SDGs UNTUK MENCAPAI TARGET 2030

Pra-pandemi Covid-19



Kebutuhan:

Rp **67ribu** Triliun

Gap:

Rp **14ribu** Triliun



PETA JALAN TPB/SDGs TAHUN 2023-2030

Kebutuhan:

Rp **122ribu** Triliun*

Gap:

Rp **24ribu** Triliun*

Pasca-pandemi Covid-19



Strategi
pendanaan SDGs

KLASTER PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN



PENDANAAN PUBLIK

PENDANAAN SWASTA

PEMBIAYAAN DOMESTIK

Anggaran pemerintah:

- Pendapatan pajak (Langsung dan tidak langsung)
- Pendapatan bukan pajak
- Pinjaman pemerintah (pinjaman, obligasi pemerintah)

Entitas publik

- Uang sitaan dan barang lelang

Pembiayaan publik-swasta

- Investasi dengan pembiayaan campuran dan pembiayaan bersama melalui
 - Kemitraan publik-swasta melalui:
 - Pembiayaan proyek
 - Special purpose vehicle (SPV)
 - Equity investment oleh BUMN dan perusahaan swasta di pasar modal
 - Asuransi/pembagian risiko

Pembiayaan komersial dalam negeri:

- Investasi swasta
- Kredit untuk sektor swasta
- Obligasi korporasi
- Investasi Kelembagaan

Pembiayaan swasta domestik non-komersial:

- Yayasan dan Ormas dalam negeri
- Organisasi keagamaan dalam negeri

PEMBIAYAAN INTERNASIONAL

Kerjasama pembangunan:

- Hibah ODA
- Pinjaman ODA
- Bantuan kemanusiaan
- Aliran resmi lainnya
- South-south cooperation

Pembiayaan swasta internasional:

- FDI
- Kredit ekspor
- Investasi Portofolio
- Dana lindung nilai

Pembiayaan swasta non-komersial internasional:

- Remittance (pengiriman uang)
- Yayasan dan Ormas internasional
- Organisasi keagamaan internasional

Strategi untuk mengoptimalkan mobilisasi pembiayaan publik dan swasta untuk SDGs:

☐ **Menyelaraskan** aliran pembiayaan publik dan swasta termasuk FDI, keuangan berkelanjutan, dan dana diam (idle fund) dengan SDGs

☐ Mengoptimalkan kapasitas keuangan publik untuk **meleverage** investasi berkelanjutan swasta

☐ Merumuskan **pembagian peran** yang tepat antara lembaga publik dan swasta dalam pembiayaan berkelanjutan



Strategi pendanaan SDGs

TERIMA KASIH

<p>1 TANPA KEMISKINAN</p> 	<p>2 TANPA KELAPARAN</p> 	<p>3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA</p> 	<p>4 PENDIDIKAN BERKUALITAS</p> 	<p>5 KESETARAAN GENDER</p> 	<p>6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK</p> 
<p>7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU</p> 	<p>8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</p> 	<p>9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR</p> 	<p>10 BERKURANGNYA KESENJANGAN</p> 	<p>11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN</p> 	<p>12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB</p> 
<p>13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM</p> 	<p>14 EKOSISTEM LAUTAN</p> 	<p>15 EKOSISTEM DARATAN</p> 	<p>16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH</p> 	<p>17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN</p> 	